

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGANGUNAN FASILITAS SANITASI DASAR DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SURABAYA TAHUN 2023

Maria Mikaela Bedha

Program Studi Administrasi Publik,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,
Mikaelamaria222@gmail.com

ABSTRAK

Kepemilikan fasilitas sanitasi dasar sangat penting bagi keberlangsungan hidup masyarakat terutama dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan hasil penelitian tentang Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 115 Tahun 2022 Tentang perubahan kedua atas peraturan walikota Surabaya Nomor 14 tahun 2019 Tentang pelaksanaan pembuatan jamban. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan menurut Merilee S. Grindle dalam Subarsono (2015;93) dipengaruhi oleh dua variabel yaitu isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan Implementasi (context of implementation). Metode penelitian yang digunakan adalah secara kualitatif deskriptif dengan Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu wawancara secara mendalam dengan informan dan dokumentasi. Selanjutnya, teknis analisis data yaitu dengan cara reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Lokasi penelitian ini dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya. Hasil penelitian menunjukkan 7922 unit Jamban telah selesai dibangun pada tahun 2023 dari 8000 perkiraan jamban yang harusnya dibangun, 78 unit tidak dibangun akibat data yang dimasukkan dari kelurahan atau kecamatan kerembangan utara tidak sesuai dengan persyaratan karena lokasi yang disampaikan merupakan alamat gudang ekspedisi milik perusahaan tertentu.

Kata kunci: *Implementasi, kebijakan publik, Fasilitas sanitasi dasar.*

ABSTRACT

Having basic sanitation facilities is very important for the survival of the community, especially in improving the quality of life and public health. This research aims to describe the results of research regarding the Implementation of Surabaya Mayor Regulation Policy Number 115 of 2022 concerning the second amendment to Surabaya Mayor Regulation Number 14 of 2019 concerning the implementation of latrine construction. This research uses policy implementation theory according to Merilee S. Grindle in Subarsono (2015; 93) which is influenced by two variables, namely policy content (policy content) and implementation environment (implementation context). The research method used is descriptive qualitative with collection techniques. The data used were in-depth interviews with informants and documentation. Next, technical data analysis is by means of data reduction, data presentation and drawing conclusions. The location of this research was carried out at the Surabaya City Environmental Service. The research results

show that 7922 latrine units have been built in 2023 out of the estimated 8000 latrine units that should have been built, 78 units were not built due to the data entered from the sub-district or sub-district of North Kembangan not being in accordance with the requirements because the location submitted was the address of an expedition warehouse belonging to a certain company.

Keywords: *Implementation, public policy, basic sanitation facilities.*

A. PENDAHULUAN

Kesehatan masyarakat merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam pembangunan sebuah kota. Kecukupan fasilitas sanitasi seperti jamban dan instalasi septictank berperan penting dalam mencegah penyakit yang dapat disebabkan oleh pencemaran lingkungan. Akses ke sanitasi merupakan pilar fundamental kesehatan masyarakat, dengan wacana sanitasi kontemporer sering memprioritaskan diskusi tentang hal-hal yang berhubungan dengan toilet. Dalam ranah epidemiologi, sanitasi berfungsi sebagai pertahanan utama terhadap penularan patogen tinja ke populasi manusia. Manajemen tinja yang efektif pada dasarnya secara signifikan mengurangi risiko tertular berbagai penyakit termasuk diare, tifoid, disentri, dan lain-lain.

Dalam panduan 5 pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dijelaskan bahwa jamban sehat yaitu jamban yang memenuhi kriteria bangunan dan persyaratan kesehatan seperti tidak menyebabkan penyebaran penyakit akibat pembuangan kotoran manusia. Kriteria bangunan jamban yaitu harus memiliki atap dan pada lubang pembuangan kotoran di bagian bawah jamban terdapat penampung.

Kota Surabaya, sebagai salah satu kota terbesar di Indonesia yang kini terus mengalami pertumbuhan penduduk dan urbanisasi yang cepat sehingga Sanitasi merupakan upaya yang dilakukan untuk menjaga lingkungan fisik yang dibutuhkan oleh masyarakat karena berdampak pada lingkungan dan kesehatan manusia. Sanitasi ini juga merupakan pemeliharaan dan penyediaan sarana juga pelayanan pada pembuangan feses dan urin. Jika sanitasi pada suatu lingkungan itu buruk maka dapat berdampak pada kesehatan masyarakat di lingkungan tersebut. Salah satu sanitasi dasar adalah kepemilikan jamban. Jika kepemilikan jamban masyarakat masih rendah, maka angka BABS akan tinggi dan hal ini dapat mengganggu kesehatan masyarakat (Mukhlisin & Solihudin, 2020). Dampak dari tidak memiliki fasilitas sanitasi dasar akan sangat serius pada Kesehatan, lingkungan dan social Masyarakat seperti (a) Penyakit Menular, seperti diare, kolera, tifus, dan infeksi saluran pernapasan. Kekurangan akses ke fasilitas sanitasi yang aman dan air bersih dapat memfasilitasi penularan bakteri, virus, dan parasit yang mengancam nyawa. (b) Kematian dan Kesehatan yang Buruk, Infeksi ini disebabkan oleh buruknya sanitasi dapat menyebabkan kematian, terutama di antara anak-anak di negara-negara berkembang. (c) Pencemaran lingkungan, yang melibatkan pencemaran air tanah dan badan air lainnya oleh kotoran manusia, bahan kimia beracun, dan berbagai jenis limbah, berpotensi menyebabkan kerusakan ekosistem alam dan memiliki efek buruk pada kesejahteraan organisme seperti hewan, tumbuhan, dan manusia yang bergantung pada sumber air ini. (d)

Kemiskinan dapat menghambat pembangunan ekonomi dan sosial. Penyakit yang disebabkan oleh buruknya sanitasi dapat menghambat produktivitas dan kehadiran kerja, sehingga mempengaruhi pendapatan dan kualitas hidup. (e) Kualitas Hidup yang Buruk, memengaruhi kualitas hidup secara keseluruhan. Ketidaknyamanan, risiko kesehatan, dan ketidakamanan yang terkait dengan kekurangan sanitasi dapat mengganggu kesejahteraan individu dan masyarakat.

Untuk mengatasi masalah ini, penting untuk mempromosikan akses yang lebih baik ke fasilitas sanitasi dasar, seperti toilet yang aman, air bersih, dan pengelolaan limbah yang tepat sehingga memerlukan upaya kolaboratif dari pemerintah, LSM, dan masyarakat untuk membangun dan memelihara fasilitas sanitasi yang aman serta untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya sanitasi dasar dalam menjaga kesehatan dan lingkungan. Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya pada tahun 2023 bertujuan untuk menyelesaikan 1.000 jamban dalam sebulan di berbagai lokasi di Kota Pahlawan, Jawa Timur. Informasi dari Dinas Kesehatan Surabaya mengungkapkan bahwa ada 26 kelurahan dari enam kabupaten di Kota Pahlawan tanpa status ODF (yang berkaitan dengan kebiasaan buang air besar terbuka) dan sekitar 6.000 lokasi belum memenuhi kriteria ODF. Hingga Januari 2023, DLH telah memulai pengerjaan 714 jamban dan telah mencapai tujuan penerapan Toilet Sehat Individu 2023 dengan target 8.000 instalasi. Akibatnya, pihak DLH berusaha untuk menyelesaikan 1.000 konstruksi jamban dalam sebulan, dengan target harian 30-40 jamban. DLH bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Surabaya, serta kecamatan dan kecamatan, dalam inisiatif ini untuk mengurangi risiko kesehatan di kalangan masyarakat rentan dan menegakkan sanitasi lingkungan.

Beberapa penilaian mengenai kendala non-teknis yang dihadapi oleh DLH Surabaya berkaitan dengan isu-isu ekspansif terkait ukuran perumahan. Hal ini mengakibatkan kebutuhan bagi anggota keluarga untuk mengungsi atau pindah sementara ke Aula RW selama pembangunan jamban. Selain itu, bahkan dengan adanya Water Closet (WC) atau toilet, limbah dibuang langsung ke sungai. Akibatnya, dalam kasus di mana ada anggota keluarga yang sakit atau anak-anak kecil, DLH bekerja sama dengan Dinkes Surabaya untuk memfasilitasi akomodasi dan perawatan sementara karena durasi pembangunan jamban yang diperpanjang, yang mencakup dua hingga tiga hari. Di sisi teknis, tantangan yang signifikan muncul dari kurangnya tenaga kerja yang tersedia untuk melaksanakan pekerjaan pemasangan jamban. Kekurangan ini berdampak pada mobilisasi bahan yang diperlukan untuk konstruksi, terutama dalam hal menavigasi melalui lorong-lorong sempit yang menghambat transportasi material. Meskipun demikian, masyarakat secara keseluruhan merangkul inisiatif pemasangan jamban yang bertujuan mempromosikan praktik Gaya Hidup Bersih dan Sehat untuk mencapai status Open Defecation Free (ODF). Program ini disediakan secara gratis, membebaskan warga dari beban keuangan apa pun.

Penelitian implementasi kebijakan pembangunan fasilitas sanitasi dasar di Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya tahun 2023 menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk mengungkap dan menganalisis implementasi kebijakan pembangunan sanitasi dari aspek isi kebijakan dan aspek lingkungan kebijakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya yang telah dilakukan oleh Dinas

Lingkungan Hidup Kota Surabaya dalam mengatasi hambatan-hambatan yang muncul selama implementasi kebijakan pembangunan sanitasi berlangsung. Tujuan ini juga didukung oleh kebijakan perwali Nomor 115 Tahun 2022 untuk membangun fasilitas sanitasi dasar berupa jamban juga menghentikan perilaku masyarakat yang melakukan Buang Air Besar Sembarangan (BABS) dan mencapai status Open Defecation Free (ODF)

B. KAJIAN PUSTAKA

a. Administrasi Publik

Perlu ditekankan bahwa untuk memahami administrasi publik, pertama-tama kita perlu memahami apa itu publik dan administrasi secara terpisah. Publik berarti pemerintah dan administrasi menyelesaikan sesuatu. Oleh karena itu, administrasi publik diartikan sebagai pengelolaan urusan pemerintahan (Khan, 2008). Menurut Massey & Johnston (2015:14) administrasi publik adalah konsep multifaset dengan beberapa fitur utama pada intinya. Bayat & Meyer (1994:4) lebih lanjut mendefinisikan administrasi publik sebagai sistem struktur dan proses yang beroperasi dalam masyarakat tertentu sebagai lingkungannya, dengan tujuan memfasilitasi perumusan kebijakan pemerintah yang tepat dan pelaksanaan kebijakan yang dirumuskan secara efektif dan efisien. Selain itu, Khan (2008:1) menggarisbawahi bahwa itu adalah pengelolaan urusan pemerintahan. Menurut The Liang Gie (1962:63), disebut administrasi. Ia mendefinisikan administrasi sebagai: "segenap proses penyelenggaraan dalam setiap usaha kerja sama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan tertentu." Dari definisi The Liang Gie tersebut, kita mendapatkan tiga unsur administrasi, yang terdiri dari (1). kegiatan melibatkan dua orang atau lebih (2). kegiatan dilakukan secara bersama-sama (3). ada tujuan tertentu yang hendak dicapai. Tiga unsur tersebut berkaitan erat satu sama lain dan terpadu. Jika salah satunya tidak ada, maka kegiatan tersebut tidak dapat disebut sebagai administrasi. Di sini administrasi publik harus kita pahami sebagai satu bagian dari administrasi; yang memusatkan perhatiannya pada kegiatan yang dijalankan atau berhubungan dengan institusi-institusi (lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi) publik. Dengan demikian, tata usaha dan administrasi publik adalah bagian dari administrasi

b. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Rangkaian implementasi kebijakan dapat diamati dengan jelas yaitu dimulai dari program, ke proyek dan ke kegiatan. Model tersebut mengadaptasi mekanisme yang lazim dalam manajemen, khususnya manajemen sektor publik. Kebijakan diturunkan berupa program- program yang kemudian diturunkan menjadi proyek-proyek, dan akhirnya berwujud pada kegiatan-kegiatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat maupun kerjasama pemerintah dengan masyarakat.

c. Konsep Kebijakan Publik

Secara etimologis, istilah kebijakan atau policy berasal dari bahasa Yunani “polis” berarti negara, kota yang kemudian masuk ke dalam bahasa Latin menjadi “politia” yang berarti negara. Akhirnya masuk ke dalam bahasa Inggris “policie” yang artinya berkenaan dengan pengendalian masalah-masalah publik atau administrasi pemerintahan. Istilah “kebijakan” atau “policy” dipergunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok maupun suatu badan pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Pengertian kebijakan seperti ini dapat kita gunakan dan relatif memadai untuk keperluan pembicaraan-pembicaraan biasa, namun menjadi kurang memadai untuk pembicaraan-pembicaraan yang lebih bersifat ilmiah dan sistematis menyangkut analisis kebijakan publik. Budi Winarno (2008:16) menyebutkan secara umum istilah “kebijakan” atau “policy” digunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok maupun suatu lembaga pemerintahan) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu, pengertian kebijakan seperti ini dapat kita gunakan dan relatif memadai untuk pembicaraan-pembicaraan-pembicaraan biasa, namun menjadi kurang memadai untuk pembicaraan-pembicaraan yang lebih bersifat ilmiah dan sistematis menyangkut analisis kebijakan publik oleh karena itu diperlukan batasan atau konsep kebijakan publik yang lebih tepat.

Frederickson dan Hart dalam Tangkilisan (2003:19), mengemukakan kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan adanya hambatan-hambatan tertentu sambil mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan. Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa kebijakan adalah suatu tindakan yang bermaksud untuk mencapai suatu tujuan untuk kepentingan yang diharapkan atau diinginkan, sedangkan kebijakan tentang Peraturan Walikota Nomor 115 Tahun 2022 Tentang Perubahan kedua atas peraturan walikota Surabaya No 14 tahun 2019 tentang pelaksanaan pembuatan jamban di kota Surabaya, pelaksanaan pembuatan jamban dalam rangka mengembangkan sanitasi yang baik serta perilaku hidup bersih dan sehat bagi Masyarakat kota Surabaya adalah suatu kebijakan yang dibuat pemerintah untuk memberikan fasilitas sanitasi dasar pelayanan public kepada Masyarakat dalam pengembangan sehingga dapat meningkatkan fasilitas sanitasi yang ada di lingkungan kota Surabaya juga mengurangi angka pencemaran air akibat BAB sembarangan.

Kerangka pemikiran penelitian ini dimulai dengan adanya permasalahan-permasalahan kesehatan mengenai (1) Penyakit Menular: Limbah manusia mengandung bakteri, virus, dan parasit yang dapat menyebabkan penyakit seperti diare, kolera, tifus, dan infeksi saluran pernapasan. (2) Kontaminasi Air Tanah: Limbah dari buang air sembarangan dapat meresap ke dalam tanah dan mencemari sumber air tanah yang digunakan untuk minum dan memasak. Ini menyebabkan berbagai penyakit yang disebabkan oleh air yang terkontaminasi. (3) Pencemaran Lingkungan: Buang air sembarangan juga mencemari lingkungan sekitarnya. Limbah manusia dapat mencemari sungai, danau, atau laut, merusak ekosistem alami dan mengganggu kehidupan hewan serta tumbuhan di sana. (4) Dampak

Sosial: Praktik buang air sembarangan juga memiliki dampak sosial yang signifikan. Ini termasuk masalah kebersihan di lingkungan sekitar, pengurangan nilai estetika, dan kurangnya privasi yang dapat memengaruhi harga diri dan martabat individu. Dari masalah-masalah tersebut. Pemerintah perlu mengatasi permasalahan di atas dengan tujuan meningkatkan pelayanan serta mensejahterakan masyarakat. Kebijakan tersebut diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 115 Tahun 2022 Tentang pelaksanaan pembuatan jamban dalam rangka mengembangkan sanitasi yang baik serta perilaku hidup bersih dan sehat bagi Masyarakat kota Surabaya, khususnya bagi masyarakat yang belum memiliki jamban, maka Pemerintah Kota Surabaya melaksanakan pembuatan jamban juga pelaksanaan pembuatan jamban sebagaimana dimaksud dilaksanakan secara efektif, efisien dan tepat sasaran. Untuk mengetahui sejauh mana implementasi Kebijakan Jampersal ini perlu dilakukan penelitian secara mendalam. Dengan alasan tersebut peneliti memutuskan untuk menggunakan teori implementasi kebijakan Merilee S. Grindle. Model tersebut menyebutkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh derajat implementability dari kebijakan tersebut. Derajat tersebut ditentukan dua variabel, yaitu:

- 1). Isi kebijakan, meliputi:
 - a. Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan.
 - b. Jenis manfaat yang akan dihasilkan.
 - c. Derajat perubahan yang diinginkan.
 - d. Kedudukan pembuat kebijakan.
 - e. (Siapa) pelaksana program.
 - f. Sumber daya yang dihasilkan.
- 2). Konteks implementasi, meliputi:
 - a. Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat.
 - b. Karakteristik lembaga dan penguasa.
 - c. Kepatuhan dan daya tanggap.

Dari evaluasi pelaksanaan kebijakan melalui indikator tersebut dapat diketahui bagaimana pelaksanaan atau implementasi Kebijakan pembuatan jamban di kota Surabaya dan apa saja hambatan dalam pelaksanaan atau implementasi Kebijakan pengembangan fasilitas dasar di Kota Surabaya.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, yakni penelitian yang di lakukan langsung di lapangan. Penelitian ini di lakukan secara langsung ke objek penelitian yaitu dinas lingkungan hidup kota Surabaya untuk mendapatkan data-data yang valid dan relevan mengenai bagaimana pelaksanaan pembuatan fasilitas sanitasi dasar yang ada di kota Surabaya sesuai dengan perwali No 115 tahun 2022. Penelitian deskriptif adalah salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia (Sukamadinata, 2006). Meleong mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah suatu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang di teliti (Meleong, metodologi

penelitian kualitatif, 2007). Penelitian kualitatif merupakan penelitian riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Dalam penelitian ini peneliti sebagai pengumpul yang mana melakukan proses penelitian secara langsung melalui proses wawancara kepada informan. Selain itu penulis juga mengumpulkan berbagai materi yang berhubungan dengan bagaimana implementasi kebijakan Pembangunan fasilitas sanitasi dasar di Dinas lingkungan hidup kota Surabaya tahun 2023.

Penelitian ini menggunakan teori Teori Merilee S. Grindle Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle (dalam Subarsono, 2011: 93) dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan implementasi (context of implementation). Variabel tersebut mencakup sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau target group termuat dalam isi kebijakan, jenis manfaat yang diterima oleh target group juga perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, apakah letak sebuah program sudah tepat, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementasinya dengan rinci, dan apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai. Sedangkan Wibawa (dalam Samodra Wibawa dkk, 1994: 22-23) mengemukakan model Grindle ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, barulah implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat implementability dari kebijakan tersebut. Isi kebijakan tersebut mencakup hal-hal berikut : (a). Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan, (b). Jenis manfaat yang akan dihasilkan. (c). Derajat perubahan yang diinginkan, (d). Kedudukan pembuat kebijakan., (f) (Siapa) pelaksana program. (g) Sumber daya yang dihasilkan. Sementara itu, konteks implementasinya adalah: (a). Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat. (b). Karakteristik lembaga dan penguasa. (c). Kepatuhan dan daya tanggap. Keunikan dari model Grindle terletak pada pemahamannya yang komprehensif akan konteks kebijakan, khususnya yang menyangkut dengan implementor, penerima implementasi, dan arena konflik yang mungkin terjadi di antara para aktor implementasi, serta kondisi-kondisi sumber daya implementasi yang diperlukan.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan hasil implementasi kebijakan pembangunan fasilitas sanitasi dasar di Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya pada tahun 2023 yang bertempat di Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskripsi yang melibatkan pengumpulan data melalui observasi dan wawancara dengan beberapa narasumber, studi kepustakaan dan studi dokumentasi, Selanjutnya, teknis analisis data yaitu dengan cara reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini berfokus pada peraturan Walikota Surabaya Nomor 115 Tahun 2022 tentang Tentang Perubahan kedua atas peraturan walikota Surabaya No 14 tahun 2019 tentang pelaksanaan pembuatan jamban di kota Surabaya dengan Teori Merilee S. Grindle yang digunakan sebagai dasar pemikiran dalam penelitian ini. Teori ini menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh derajat implementability dari kebijakan tersebut. Derajat tersebut ditentukan dua

variabel, yaitu kebijakan (content of policy) dan lingkungan implementasi (context of implementation).

Penelitian implementasi kebijakan pembangunan fasilitas sanitasi dasar didinas lingkungan hidup kota Surabaya tahun 2023 ini dapat dilihat dari 7922 unit jamban yang berhasil dibangun dari 8000 perkiraan pembangunan jamban ditahun 2023 ,78 unit yang tidak dibangun karena terkendala data yang salah dimasukan dari kelurahan atau kecamatan Krembangan utara sehingga tidak sesuai dengan lokasi yang akan dibangun fasilitas sanitasi dasar, sebab wilayah tersebut merupakan alamat gudang ekspedisi milik perusahaan tertentu sehingga tidak termasuk sayarat dalam undang-undang perawali No 115 Tahun 2022. Berikut konteks dari isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan implementasi (context of implementation) menurut teori Merilee S. Grindle yaitu sebagai berikut : Sebuah kebijakan merupakan peraturan yang di buat oleh pemerintah untuk mengatasi semua permasalahan yang terjadi di lingkungan masyarakat dengan melibatkan pihak dan kepentingan-kepentingan tertentu pada proses implementasinya. Kepentingan-kepentingan yang berdasarkan oleh kebijakan tentu saja adalah sasaran dari kebijakan itu sendiri. dalam penelitian ini kelompok sasarannya adalah masyarakat yang memiliki syarat seperti warga kota Surabaya kartu keluarga (KK),kartu tanda penduduk (KTP), surat tanah, surat keterangan tidak mampu, warga miskin,masyarakat perpenghasilan rendah Berikut peneliti menjelaskan tentang indikator kepentingan kelompok sasaran dalam implementasinya.

Pembahasan hasil penelitian merupakan interpretasi hasil akhir dari melakukan pengujian data dengan teori dan konsep para ahli sehingga bisa mengembangkan sebuah teori serta mendeskripsikan hasil data dan fakta yang berada di lapangan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan narasumber diatas, maka dapat di analisis melalui teori implementasi kebijakan model Merilee S. Grindle (1980) dikenal dengan Implementation as A Political and Administrative Procces. Menurut Grindle ada 2 variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, yaitu :

1. Isi kebijakan (Content of policy)

- a) Kepentingan yang di pengaruhi kebijakan (*Interest affected*)
Indikator ini berargumen bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan-kepentingan yang dimana membawa pengaruh atau dampang terhadap kebijakan mplementasi yang diterapkan.
- b) Jenis Manfaat yang dihasilkan
Merupakan jenis manfaat yang diharapkan atau yang akan diterima oleh target grup atau kelompok sasaran. Pada point ini content of policy (isi kebijakan) berupaya untuk menunjukkan atau menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan.
- c) Derajat erubahan yang ingin dicapai (*Extent of change envision*)
Setiap kebijakan memiliki target yang hendak dan ingin dicapai. Content of policy (isi kebijakan) yang ingin dijelaskan pada poin ini adalah bahwa

sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan haruslah memiliki skala yang jelas.

- d) Letak pengambilan keputusan (Site of decision making)
Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memegang peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, maka pada bagian ini harus dijelaskan dimana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan. Apakah letak sebuah program sudah tepat.
- e) Pelaksana program (Program implementer)
Dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten demi keberhasilan suatu kebijakan. Ini sudah harus terpapar atau terdata dengan baik, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci.
- f) Sumber-sumber daya yang digunakan (Resources committed)
sebuah program didukung oleh sumber daya yang memadai. Pelaksanaan kebijakan harus didukung oleh sumber-sumber daya yang mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik.

2. Lingkungan Implementasi (Context of Implementation)

- a) Kekuasaan, kepentingan-kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat (Power, interest, and strategy of actor involved)
Dalam suatu kebijakan perlu dipertimbangkan pula kekuatan atau kekuasaan, kepentingan serta strategi yang digunakan oleh para aktor yang terlibat guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan. Bila hal ini tidak diperhitungkan dengan matang, sangat besar kemungkinan program yang hendak diimplementasikan akan jauh hasilnya dari yang diharapkan.
- b) Karakteristik lembaga dan rezim yang sedang berkuasa (Institution and regime characteristic)
Lingkungan dimana suatu kebijakan tersebut dilaksanakan juga berpengaruh terhadap keberhasilannya, maka pada bagian ini ingin dijelaskan karakteristik dari suatu lembaga yang akan turut mempengaruhi suatu kebijakan.
- c) Tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana (Compliance and responsiveness)
Hal lain yang dirasa penting dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan adalah kepatuhan dan respon dari para pelaksana, maka yang hendak dijelaskan pada poin ini adalah sejauhmana kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan. Setelah kegiatan pelaksanaan kebijakan yang dipengaruhi oleh isi.

Faktor Pendukung Keberhasilan Implementasi Kebijakan Pembangunan Fasilitas Sanitasi Dasar di Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya Tahun 2023

Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan pembangunan fasilitas sanitasi dasar di Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya tahun 2023 dapat dilihat dari beberapa indikator : (1). Konten Kebijakan: Kebijakan yang jelas dan spesifik tentang pembangunan fasilitas sanitasi dasar dapat

membantu dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat. (2). Kekuasaan, Kepentingan, dan Strategi Aktor yang Terlibat: Kekuasaan dan kepentingan aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan, serta strategi yang digunakan, dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi.(3). Karakteristik Lembaga dan Penguasa: Ciri-ciri penguasa atau lembaga yang menjadi implementor mempengaruhi dan menentukan keberhasilan kebijakan.(4). Kepatuhan dan Daya Tanggap Pelaksana: Kepatuhan dan daya tanggap pelaksana program dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan.(5). Pelaksana Program: Tingkat keberhasilan suatu kebijakan akan dinilai tinggi ketika pelaksana program memiliki kemampuan dan dukungan yang dibutuhkan oleh kebijakan. (6). Sumber Daya yang Disediakan: Semakin tersedianya sumber daya yang dibutuhkan, maka implementasinya akan juga lebih mudah.(7).Koordinasi dan Sinkronisasi: Koordinasi antara Dinas Lingkungan Hidup dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Pertamanan serta dengan masyarakat setempat sangat penting dalam meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan.

Koordinasi ini membantu dalam mengatasi permasalahan keterbatasan lahan sebagai Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) di Kota Surabaya.(7). Partisipasi Masyarakat: Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sanitasi melalui program fasilitator sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) sangat efektif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kebersihan lingkungan. Masyarakat lebih sadar dan berpartisipasi aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan.(8). Penggunaan Teknologi: Penggunaan platform digital dalam pengelolaan sanitasi meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan sanitasi. Data dapat dikumpulkan dan dipantau dengan lebih baik, sehingga dapat memantau proses pengelolaan sanitasi secara lebih efektif. (9) Komunikasi: Komunikasi yang efektif dalam proses implementasi kebijakan sangat penting. Informasi mengenai pengumpulan sampah dan pemilahan sampah harus disampaikan dengan baik dan jelas ke warga, sehingga masyarakat dapat memahami dan mematuhi kebijakan. (10). Sumber Daya: Sumber daya yang memadai dan kompeten dalam pelaksanaan kebijakan sangat penting. Sumber daya memberikan penjelasan bahwa sejelasa apapun kebijakan yang berlaku jika sumber daya pelaksana kebijakan tidak berkompeten dan kurang memadai dapat menimbulkan kebijakan yang kurang efektif. (11). Transparansi: Transparansi dalam pengelolaan sanitasi sangat penting. Transparansi memungkinkan masyarakat untuk memahami dan mematuhi kebijakan, serta memantau proses pengelolaan sanitasi secara lebih efektif. (12). Edukasi dan Promosi: Edukasi dan promosi tentang pentingnya kebersihan lingkungan serta perilaku yang sehat dalam pengelolaan sanitasi sangat efektif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat. Program PHBS, misalnya, telah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menghentikan perilaku buang air besar sembarangan.(13).Adanya kesadaran dan kepedaan masyarakat terhadap pentingnya fasilitas sanitasi dasar yang baik.(14). Adanya koordinasi yang efektif antara Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya dengan masyarakat dan pemerintah setempat.

Dengan demikian, faktor-faktor tersebut sangat penting dalam meningkatkan keberhasilan implementasi kebijakan pembangunan fasilitas sanitasi dasar di Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya tahun 2023.

E. PENUTUP

Kesimpulan

Dalam penelitian ini, menggunakan teori Merile S. Grindle dan metode penelitian kualitatif deskriptif, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan fasilitas sanitasi dasar di Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya tahun 2023 telah memberikan dampak positif pada kualitas hidup masyarakat. Dampak tersebut meliputi:

- a) Penggunaan Teknologi: Penggunaan platform digital telah meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan sanitasi, sehingga data dapat dikumpulkan dan dipantau dengan lebih baik.
- b) Dampak Sosial-Ekonomi: Implementasi kebijakan telah meningkatkan pendapatan masyarakat melalui program BSIS dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kebersihan lingkungan.
- c) Dampak Lingkungan: Implementasi kebijakan telah mengurangi tumpukan sampah di Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik.
- d) Implementasi kebijakan fasilitas sanitasi dasar di Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya tahun 2023 telah dilakukan dengan tujuan meningkatkan kualitas fasilitas sanitasi dasar di kota Surabaya.
- e) Kebijakan ini bertujuan untuk memenuhi standar kesehatan dan mencegah penyebaran penyakit melalui fasilitas sanitasi yang baik dan terjaga.
- f) Penyediaan Fasilitas Sanitasi Dasar: Implementasi kebijakan telah meningkatkan jumlah fasilitas sanitasi dasar di wilayah Kota Surabaya, sehingga masyarakat memiliki akses yang lebih baik pada fasilitas sanitasi.
- g) Partisipasi Masyarakat: Program STBM telah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sanitasi, sehingga masyarakat lebih sadar dan berpartisipasi aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan.

Dalam kesimpulan ini implementasi kebijakan fasilitas sanitasi dasar di dinas lingkungan hidup kota Surabaya tahun 2023 telah memberikan dampak positif pada kualitas hidup Masyarakat dan lingkungan. Dengan demikian kebijakan ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi kota-kota lain di Indonesia dalam meningkatkan fasilitas sanitasi dasar dan meningkatkan kualitas hidup Masyarakat.

Saran

Bagi Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya

- a. Melakukan perbaikan struktur birokrasi untuk memastikan koordinasi yang efektif dalam pelaksanaan kebijakan.
- b. Meningkatkan sumber daya dan anggaran yang memadai untuk melaksanakan kebijakan.
- c. Melakukan penyuluhan dan pendidikan masyarakat tentang pentingnya fasilitas sanitasi dasar yang baik

Bagi Masyarakat

- a. Meningkatkan kesadaran dan kepedaan terhadap pentingnya fasilitas sanitasi dasar yang baik.
- b. Berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan kebijakan fasilitas sanitasi dasar.
- c. Meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya perbaikan-perbaikan penting terhadap undang-undang atau peraturan yang bersangkutan.

Bagi Pemerintah Setempat

- a. Meningkatkan perhatian terhadap lingkungan sekolah dan masyarakat, serta membantu sekolah-sekolah yang ada untuk memperbaiki lingkungan sekolahnya.
- b. Melakukan pemeriksaan sarana sanitasi dasar secara rutin dan penyuluhan kesehatan secara teratur.

Bagi Peneliti

- a. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai landasan pemikiran untuk menjadi pemrakarsa upaya pemeliharaan kesehatan di institusi pendidikan berupa penyediaan sarana sanitasi dasar yang memenuhi standar kesehatan yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, implementasi kebijakan fasilitas sanitasi dasar di Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya tahun 2023 dapat lebih efektif dan efisien dengan adanya perbaikan struktur birokrasi, meningkatkan sumber daya dan anggaran, serta meningkatkan kesadaran dan kepedaan masyarakat terhadap pentingnya fasilitas sanitasi dasar yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Modupi.Selepe.(2023). Politics-Administration and Public Policy: Some Explanations for Public Administration Community. International Journal of Social Science Research and Review, Volume 6, Issue 7 July, 2023 Pages: 507-515. <http://dx.doi.org/10.47814/ijssrr.v6i7.1341>
- Kementerian Kesehatan RI. Departemen Kesehatan RI. 1996. Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Dampak Sampah (Aspek Kesehatan Lingkungan). Jakarta: Pusat Kesehatan Lingkungan Depkes RI.
- Departemen Kesehatan RI. 2004. Pedoman Peran Kesehatan Masyarakat Nasional. Jakarta: Pusat Promosi Kesehatan Depkes RI.
- Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. 2014. Profil Kesehatan Provinsi Jawa Timur: Surabaya: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.
- Badan Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI. 2013. Riset Kesehatan Dasar.
- Suryani, A. S., Penelitian, P., Keahlian, B., Ri, D., Jenderal, J., & Subroto, G. (2020). Pembangunan Air Bersih dan Sanitasi saat Pandemi Covid-19 Clean Water and Sanitation Development during the Covid-19 Pandemic. *Jurnal Masalah-Masalah Sosial* /, 11(2), 2614–5863.